

ANALISIS KINERJA KOPERASI SYARIAH BMT TRANS MEKAR SARI MANDIRI DI WILAYAH PERTANIAN KECAMATAN TANJUNG LAGO PADA MASA PENDEMI COVID-19

PERFORMANCE ANALYSIS OF THE SHARIA COOPERATIVE BMT TRANS MEKAR SARI MANDIRI IN AGRICULTURAL AREA OF TANJUNG LAGO DISTRICT DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Nirmala Jayanti¹, Rizky Tirta Adhiguna², Yuwinti Nearti³

^{1,3} Dosen Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Selatan

² Dosen Teknik Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya

Email: nirmala.jayanti@uss.ac.id

Abstract

Non-bank financial institutions that can be used as a solution in dealing with the problem of limited capital owned by business actors in the agricultural sector and which are quite familiar in the life of farmers are cooperatives. One of the efforts to increase the development of cooperatives in a positive direction is to improve the performance of cooperatives in the aspects of capital, productive asset quality, management, efficiency, liquidity, independence and growth, cooperative identity and sharia principles. The performance assessment of sharia cooperatives can be carried out through the application of the Regulation of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 07/Per/Dep/2016 concerning the Implementation of Sharia Savings and Loans and Financing Business Activities by Cooperatives. Each aspect is given a weight and then a score is obtained to determine the predicate of cooperatives ranging from very unhealthy to healthy. This research was conducted at the Trans Mekar Sari Mandiri BMT Cooperative in the agricultural area of the Tanjung Lago sub-district which was also affected by the COVID-19 pandemic, namely a decrease in remaining operating results and an increase in member non-performing loans. The research was conducted using survey methods and direct field interviews with respondents. Sampling was carried out using a gradual sampling method (Multiple Sampling) with a sample of 33 respondents. The data collected is in the form of RAT data for the 2021 financial year. The results of the study state that the performance assessment of the Trans Mekar Sari Mandiri BMT Cooperative during the COVID-19 pandemic showed a fairly healthy predicate but there were still many shortcomings in aspects of the quality of productive assets and aspects of liquidity.

Keywords: performance, sharia cooperative, covid-19 pandemic

Abstrak

Lembaga keuangan non bank yang dapat dijadikan solusi dalam menghadapi persoalan keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha di sektor pertanian dan yang sudah cukup akrab di kehidupan petani adalah Koperasi. Salah satu usaha untuk meningkatkan perkembangan koperasi ke arah yang positif adalah dengan memperbaiki kinerja koperasi dalam aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri Koperasi dan prinsip syariah. Penilaian kinerja koperasi syariah dapat dilakukan melalui Penerapan Peraturan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep/2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Masing-masing aspek diberi bobot untuk selanjutnya diperoleh skor untuk menentukan predikat koperasi mulai dari sangat tidak sehat sampai dengan sehat. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri di wilayah pertanian kecamatan Tanjung Lago yang juga terkena dampak pandemi Covid 19 yaitu berupa penurunan sisa hasil usaha dan meningkatnya kredit macet anggota. Penelitian dilakukan dengan metode survey dan wawancara langsung dilapangan dengan responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling bertahap (*Multiple Sampling*) dengan sampel sebanyak 33 responden. Data yang dikumpulkan berupa data RAT tahun buku 2021. Hasil penelitian menyatakan bahwa penilaian kinerja Koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri pada masa pandemi covid-19 menunjukkan predikat cukup sehat namun masih banyak kekurangan pada aspek kualitas aktiva produktif dan aspek likuiditas.

Kata Kunci: Kinerja, Koperasi Syariah, Pandemic Covid-19

I. PENDAHULUAN

Solusi dalam menghadapi persoalan keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha di sektor pertanian adalah lembaga keuangan non bank [1]. Salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang sudah cukup akrab di kehidupan petani adalah koperasi. Koperasi di Indonesia bergerak dalam berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, salah satunya di bidang pertanian. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani maka peranan koperasi dalam bidang pertanian memiliki andil yang sangat besar bagi kepentingan para petani.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang terdampak oleh Covid-19. Menurut data [2] mengatakan sebanyak 1.785 unit koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia terdampak Covid-19. Tercatat koperasi konsumen merupakan koperasi yang paling parah terdampak Covid-19 yaitu 45 persen dari total sejumlah 781 unit, koperasi layanan sebanyak 8 persen atau 158 unit, dan koperasi produsen sebanyak 7 persen atau 152 unit. Perkembangan koperasi di Indonesia, dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan positif. Data Kementerian Koperasi menyebutkan, jika pada tahun 2013, Indonesia memiliki 143.117 unit koperasi aktif. Jumlah tersebut meningkat menjadi 147.249 unit koperasi aktif pada tahun 2014. Angka itu naik lagi menjadi 150.223 unit koperasi aktif pada tahun 2015. Dari jumlah koperasi aktif tersebut, sebanyak 1,5% atau 2.253 unit adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah [3]. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (yang selanjutnya disebut KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya berupa simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah [4].

Mengingat besarnya peran koperasi bagi perekonomian Indonesia, maka kegiatan koperasi membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dari koperasi, sehingga tujuan untuk meningkatkan peran koperasi di sektor perekonomian kerakyatan akan tercapai melalui koperasi yang berkinerja sehat salah satunya koperasi syariah. Penelitian [5] menyebutkan bahwa tujuan utama pengukuran kinerja adalah untuk memberikan motivasi bagi karyawan guna mencapai tujuan perusahaan dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan oleh perusahaan. Tujuan penilaian kinerja adalah sebagai alat diagnostic dan proses penilai terhadap pengembangan individu, tim dan organisasi.

Penelitian tentang kesehatan koperasi syariah, sebelumnya juga pernah dilakukan oleh [6] dengan judul Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. Metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi yang meliputi 5 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan. Sementara, penelitian tingkat kesehatan pada koperasi syariah (Studi di KPN Syariah Kemenag Tanah Datar) pernah dilakukan oleh [7] berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi. Berdasarkan peraturan tersebut penilaian koperasi syariah meliputi 8 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek manajemen, aspek jatidiri koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah. Penelitian lainnya oleh [8] menyatakan bahwa hasil perhitungan terhadap 8 aspek dalam penilaian kesehatan pada KSPPS BMT NU Tuban tahun buku 2020 yang sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum KSPPS BMT NU Singgahan Tuban termasuk pada kategori sehat dengan skor akhir 78.7. Kondisi ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT NU Singgahan Tuban mampu memberikan kepercayaan kepada anggotanya dalam pengelolaan keuangannya.

Perkembangan koperasi syariah di Kabupaten Banyuasin cukup signifikan. Tercatat ada 9 koperasi syariah yang cukup berkompoten di Kabupaten Banyuasin salah satu

diantaranya yang telah melakukan RAT dan terkena dampak covid 19 yaitu Koperasi Syariah BMT Trans Mekar Sari Mandiri. Karena kondisi ini maka peneliti akan melakukan Penilaian kinerja koperasi syariah didasarkan pada Perdep Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam syariah dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam syariah dan pembiayaan syariah yaitu mengukur kinerja koperasi di wilayah pertanian akan dinilai dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah pada Koperasi Syariah BMT Trans Mekar Sari Mandiri.

II. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin dengan mengambil sampel di Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago. Koperasi penelitian adalah Koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri yang berlokasi di Jl. Tanjung Api-api Km 42 Desa Mulia Sari KTM Telang. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa pada Kecamatan ini merupakan wilayah yang memiliki Koperasi jasa keuangan syariah yang beranggotakan petani dan KUBE serta telah melakukan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2021) dan termasuk salah satu koperasi yang terdampak pandemi covid 19. Pengambilan data akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022 sampai dengan selesai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey*. Menurut [9], metode penelitian survei adalah metode pengamatan dan penyidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu di dalam daerah atau lokasi tertentu. Dalam metode ini peneliti secara langsung datang ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara kepada pengurus, pengawas dan anggota Koperasi. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengadakan pengamatan secara menyeluruh untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara aktual dari daerah yang diteliti.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dengan anggota koperasi contoh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Data sekunder yang berguna untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan penelitian ini, yaitu Badan Pusat Statistik, serta literatur-literatur seperti Laporan RAT koperasi tahun buku 2021, buku, jurnal, artikel dan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Metode penarikan contoh yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 metode adalah metode sampling bertahap (*Multiple Sampling*) yaitu suatu metode pengambilan sampel dengan mengkombinasikan berbagai teknik sampling probabilitas yang ada pada sampel petani (anggota) atau (KUBE). Untuk penarikan sampel pengurus dan pengawas koperasi digunakan metode sampling jenuh yaitu cara pengambilan sampel jika semua unit sampling dalam populasi dijadikan sampel. Jadi Total keseluruhan sampel sebanyak 33 responden.

Pengolahan Data

Mengukur kinerja koperasi syariah di wilayah pertanian akan dinilai dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah yang didasarkan pada Perdep Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam syariah dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam syariah dan pembiayaan syariah [10] yaitu :

1. Aspek Permodalan

Penilaian aspek permodalan dinilai dengan menggunakan dua rasio yaitu :

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- b. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif dinilai dengan menggunakan 3 rasio yaitu :

- a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

$$\frac{\text{Pembiayaan \& Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang \& Pembiayaan}} \times 100\%$$

- b. Rasio portofolio pembiayaan beresiko

$$\frac{\text{Jumlah portofolio beresiko}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$$

- c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

$$\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

3. Aspek Manajemen

Penilaian pada aspek manajemen berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap reponden terpilih di koperasi syariah antara lain meliputi :

a. Manajemen Umum

Manajemen umum terdiri dari 12 pertanyaan yaitu :

1. Apakah KJKS memiliki visi, misi & tujuan yg jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)?
2. Apakah KJKS telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun kedepan & dijadikan sebagai acuan KSPPS dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)?
3. Apakah KJKS memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)?
4. Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)?
5. visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)?
6. Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)?
7. Pengurus dan atau pengelola KJKS memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan?
8. KJKS memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)?
9. Pengurus KJKS/USPPS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KJKS/USPPS Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)?
10. Anggota KJKS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)?
11. Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KJKS di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yg cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan Kelompok nya, atau berpotensi merugikan KJKS (konfirmasi dengan mitra kerja)?

12. Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)?

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan terdiri dari 6 pertanyaan yaitu :

1. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KJKS dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)?
2. KJKS memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification) ?
3. Di dalam struktur kelembagaan KJKS terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)?
4. KJKS terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KJKS)?
5. KJKS telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KJKS/USPPS Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)?
6. KJKS mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)?

c. Manajemen permodalan

Manajemen Permodalan terdiri dari 5 pertanyaan yaitu :

1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)?
2. Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)?
3. Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan?
4. Simpanan wadiah Simpanan Mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya?
5. Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)?

d. Manajemen aktiva

Manajemen aktiva terdiri dari 10 pertanyaan yaitu :

1. Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman) ?
2. Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya) ?
3. Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)?
4. Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)?
5. KJKS menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya)?
6. Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)?
7. Dalam memberikan pembiayaan KJKS mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan)?
8. Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)?

9. Setelah pembiayaan diberikan KJKS melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)
10. KJKS melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)?

e. Manajemen likuiditas

Manajemen likuiditas terdiri dari 5 pertanyaan yaitu :

1. Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)?
2. Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain)?
3. Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai mengenai skedul piutang dan pembiayaan)?
4. Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KJKS/USPPS koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)?
5. Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan piutang dan pembiayaan)?

4. Aspek Efisiensi

Penilaian aspek efisiensi dengan menggunakan tiga rasio yaitu :

- a. Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto

$$\frac{\text{Biaya operasional pelayanan}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$$
- a. Rasio aktiva tetap terhadap total asset

$$\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$
- a. Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

5. Aspek Likuiditas

Penilaian aspek likuiditas dengan menggunakan dua rasio, yaitu :

- a. Cash Rasio

$$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$$
- b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

$$\frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

6. Aspek Jatidiri Koperasi

Penilaian pada aspek jatidiri koperasi dengan menggunakan dua rasio yaitu :

- a. Rasio partisipasi bruto

$$\frac{\text{Jumlah partisipasi bruto}}{\text{Jumlah partisipasi bruto+transaksi non anggota}} \times 100\%$$
- a. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA)

$$\frac{\text{MEP + SHU bagian anggota}}{\text{Total simpanan pokok + simpanan wajib}} \times 100\%$$

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan dengan menggunakan tiga rasio yaitu :

- a. Rentabilitas Aktiva

$$\frac{\text{SHU sebelum nisbah,zakat dan pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

- b. Rentabilitas Equitas
$$\frac{\text{SHU bagian Anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$$
- c. Kemandirian operasinal pelayanan
$$\frac{\text{Pendapatan usaha}}{\text{Biaya operasional pelayanan}} \times 100\%$$

8. Kepatuhan prinsip syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah didasarkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip syariah terdiri dari 10 pertanyaan yaitu :

1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian dewan syariah)?
2. Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)?
3. Adanya dewan pengawas syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)?
4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah?
5. Pertemuan rutin kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara silaturahmi dan pertemuan pertemuan kelompok)?
6. Manajemen KJKS memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat)?
7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)?
8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)?
9. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota)?
10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KJKS)?

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian yang dilakukan terhadap aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah akan diperoleh skor secara keseluruhan. Skor yang didapat untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan kinerja koperasi syariah yang dibagi dalam 4 golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan kinerja koperasi syariah sebagai berikut :

Tabel 1. Penetapan predikat tingkat kesehatan kinerja koperasi syariah.

Skor	Predikat
$80 \leq x < 100$	Sehat
$66 \leq x < 80$	Cukup Sehat
$51 \leq x < 66$	Dalam Pengawasan
$0 < x < 51$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM,2016.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Kinerja koperasi syariah merupakan pengukuran keberhasilan koperasi pada tahun buku 2021 dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mengukur kemampuan koperasi dalam pembiayaan modal dan pembayaran hutang koperasi berdasarkan kepatuhan prinsip syariah. Pengukuran kinerja koperasi syariah dapat dilakukan melalui penilaian kesehatan koperasi syariah secara

periodik. Pedoman penilaian kesehatan koperasi syariah di dilihat dari berbagai aspek menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop & UKM RI No 07/Per/Dep.6/IV/2016 yaitu :

Tabel 2. Penilaian Kinerja KSUS BMT Trans Mekar Sari Mandiri

No	Aspek	Nilai Bobot (%)	Skor	Kriteria
1	Permodalan			
	a.Rasio modal sendiri terhadap total asset	19	3,75	Cukup
	b.Rasio kecukupan modal (CAR)	33	5	Sehat
2	Kualitas Aktiva Produktif			
	a.Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan	88	2,5	Tidak lancar
	b.Rasio portofolio pembiayaan beresiko	14	5	Tidak beresiko
	c.Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)	12	1	Diragukan
3	Manajemen			
	a.Manajemen umum	2,27	2,27	Baik
	b.Manajemen kelembagaan	2,12	2,12	Cukup baik
	c.Manajemen permodalan	1,15	1,15	Kurang baik
	d.Manajemen aktiva	1,65	1,65	Cukup baik
	e.Manajemen likuiditas	2,35	2,35	Baik
4	Efisiensi			
	a.Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto	37	4	efisien
	b.Rasio aktiva tetap terhadap total aset	1	4	Baik
	c.Rasio efisiensi pelayanan	16	0,5	Tidak baik
5	Likuiditas			
	a.Rasio Kas	30	10	Likuid
	b.Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima	36	1,25	Tidak likuid
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			
	a.Rasio rentabilitas asset	67	3,75	Cukup
	b.Rasio rentabilitas modal sendiri	90	5	Bermanfaat
	c.Rasio kemandirian operasional pelayanan	11	3	Tinggi
7	Jatidiri Koperasi			
	a.Rasio partisipasi bruto	23	3	Tinggi
	b.Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)	237	4	Tinggi
8	Kepatuhan Prinsip Syariah			
	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	7,84	7,84	Patuh
	Jumlah		74,38	Cukup sehat

Sumber: Analisis Data, 2022

Penilaian kinerja KSUS BMT Trans Mekar Sari Mandiri tahun buku 2021 dilihat dari keseluruhan aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah secara keseluruhan memiliki skor yang terletak pada $66 \leq x < 80$ dengan predikat cukup sehat. Hal ini berarti kinerja KSUS BMT Trans Mekar Sari Mandiri secara keseluruhan sudah cukup sesuai dengan aturan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop & UKM RI No 07/Per/Dep.6/IV/2016. Walaupun dinilai kinerja ini sudah cukup baik namun masih banyak masih banyak kekurangan seperti pada aspek kualitas aktiva produktif pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang skornya masih dibawah 50% dari skor maksimum. Hal ini disebabkan persentase tunggakan (piutang bermasalah) yang cukup besar sekitar 10% dari jumlah pembiayaan serta masih kecilnya pengalokasian dana untuk penghapusan aktiva produktif yang ada. Selain itu tidak adanya agunan yang digunakan dalam pembiayaan yang disalurkan. Pada aspek manajemen (manajemen permodalan) skornya juga tidak mencapai 50% dari skor maksimum yaitu hanya 1,15. Hal ini disebabkan pertumbuhan modal sendiri masih lebih kecil dari pertumbuhan asset dan penyisihan cadangan belum melebihi dari seperempat bagian SHU yang diperoleh. Aspek likuiditas (rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima) memiliki skor 1,25 artinya $< 50\%$ dari skor maksimum. Hal ini dikarenakan total pembiayaan lebih kecil dari dana yang diterima atau dengan kata lain jumlah pembiayaan minimal 75% dari dana yang diterima.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penilaian kinerja Koperasi BMT Trans Mekar Sari Mandiri tahun buku 2021 menunjukkan predikat cukup sehat walaupun dinilai kinerja ini sudah cukup baik namun masih banyak masih banyak kekurangan seperti pada aspek kualitas aktiva produktif pada rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang skornya masih dibawah 50% dari skor maksimum. Hal ini disebabkan persentase tunggakan (piutang bermasalah) yang cukup besar sekitar 10% dari jumlah pembiayaan serta masih kecilnya pengalokasian dana untuk penghapusan aktiva produktif yang ada. Selain itu tidak adanya agunan yang digunakan dalam pembiayaan yang disalurkan. Pada aspek manajemen (manajemen permodalan) skornya juga tidak mencapai 50% dari skor maksimum yaitu hanya 1,15. Hal ini disebabkan pertumbuhan modal sendiri masih lebih kecil dari pertumbuhan asset dan penyisihan cadangan belum melebihi dari seperempat bagian SHU yang diperoleh. Aspek likuiditas (rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima) memiliki skor 1,25 artinya $< 50\%$ dari skor maksimum. Hal ini dikarenakan total pembiayaan lebih kecil dari dana yang diterima atau dengan kata lain jumlah pembiayaan minimal 75% dari dana yang diterima.

Saran

1. Peningkatkan kinerja Koperasi syariah dapat dilakukan dengan memperbaiki aspek kualitas aktiva produktif dengan menerapkan agunan pada pinjaman dengan nilai pinjaman diatas 5 juta, menyediakan dana cadangan guna menutup tunggakan hutang anggota dari SHU yang diperoleh.
2. Memperbaiki aspek likuiditas dapat dilakukan dengan mengalokasikan kas dan bank pada simpanan jangka pendek atau piutang anggota agar mudah dicairkan untuk pemenuhan kebutuhan mendadak, pembenahan pada promosi ekonomi anggota dengan memberikan persentase bagi hasil yang lebih rendah untuk Koperasi agar anggota diharapkan dapat berpartisipasi memanfaatkan program simpanan dan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andriani; Rizky Kurniawan Pambudi, "Penilaian Kinerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Integra*, vol. 12, no. 2, pp. 203-217, 2022.
- [2] Farhana, Nabila; Herlina Pusparini, Nungki Kartikasari, "Penentuan Strategi Berdasarkan Tingkat Kesehatan Koperasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus KPRI Syariah UIN Mataram)," *Jurnal Risma*, vol. 2, no. 2, pp. 235-249, 2022.
- [3] P, Prayogo; Umi Amaliyah, Sri Mulyati, "Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM," *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 7, no. 2, pp. 5-26, 2018.
- [4] Maresti, Dwila; Sriwahyuni Riza, "Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/DEP.6/IV/2016 pada KSPPS Tanah Sirai Piai Nan XX Kota Padang Periode 2016-2018," *Journal of Economics and Business*, vol. 4, no. 1, pp. 68-81, 2020.
- [5] Funna, H.S.R; Suazhari, "Aanalisis Pengukuran Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Balanced Scorecard (Studi Pada Koperasi Syariah Baiturrahman Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol. 4, no. 3, pp. 532-546, 2019.
- [6] Okfitasari, Antin; Agus Suyatno, "Analisis Kesehatan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 02, pp. 103-115, 2018.
- [7] Mirawati; Nita Firia, Muhammad Deni Putra dan Meireza Putri, "Pengukuran Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Syariah (Studi di KPN Syariah Kemenag Tanah Datar)," *Journal of Sharia Economics Research (ILTIZAM)*, vol. 5, no. 1, pp. 18-35, 2021.
- [8] Hidayatin, Dina Alafi; Rika Puspita Sari, Novianita Sari, "Analisis Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Tengah Pandemi Covid 19," *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, vol. 10, no. 3, pp. 56-68, 2022.
- [9] Sriati, *Metode Penelitian Sosial*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2012.
- [10] "Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman dan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi".